



Belum Ada Standar Akuntansi Laporan Bantuan Keuangan Parpol

NGABANG-RK. Hingga kini belum ada standar akuntansi keuangan khusus yang dijadikan dasar penyusunan laporan bagi Partai Politik (Parpol) yang menerima bantuan dari pemerintah.

"Sehingga Pengurus Parpol perlu mendapatkan Bimtek (Bimbingan Teknis) tentang laporan bantuan keuangan tersebut, supaya laporannya berkualitas," kata Benipiator, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Landak, saat Bimtek Bantuan Keuangan kepada Parpol yang mendapat kursi di DPRD Landak pada Pemilu 2014 lalu, di Aula Kecil Bupati Landak, Kamis (15/6).

Menurut Benipiator, dengan belum adanya Bimtek atau Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), ditambah kurangnya pengawasan dari lembaga terkait, sangat memungkinkan terjadi penyimpangan, penyalahgunaan dan pelanggaran bantuan keuangan terhadap Parpol.

Dengan diadakannya Bimtek ini, kata Benipiator, diharapkan terbangun transparansi pengelolaan keuangan negara yang tertib administrasi, efisien dan bertanggungjawab dengan memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Parpol yang mengikuti Bimtek ini, tambah dia, tentu akan memiliki pengetahuan dan pemahaman dalam pengelolaan bantuan keuangan Parpol serta dapat meningkatkan kualitas laporan pertanggungjawabannya.

Bimtek bantuan keuangan ini diikuti Ketua, Sekretaris dan Bendahara Parpol yang mempunyai kursi di DPRD Landak, yakni PDIP, Gerindra, Nasdem, Golkar, Partai Demokrat, PAN, PKPI, Hanura, PKB, dan PPP.

Dalam Bimtek tersebut juga hadir Badan Pengawasan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Kalbar, Agvita Windiadi. (*ius*)



BIMTEK. Pengurus Parpol mengikuti Bimtek Bantuan Keuangan, di Aula Kecil Bupati Landak, Kamis (15/6). *Antonius-RK*